

**PENGARUH DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, UPAH MINIMUM
PROVINSI DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA**

Dewi Lestari

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa
Email: dewilestari2094@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of the distribution of zakat, infaq, sedekah, provincial minimum wages and poverty on human development index in Indonesia. The writing method used is a quantitative research method, with secondary data types namely ZIS annual data, provincial minimum wage, poverty and human development index for 2016-2020 obtained from BAZNAS and the Badan Pusat Statistic (BPS). Technical analysis of the data carried out in the form of classical assumption test in the form of normality test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. Meanwhile, the hypothesis test includes panel data regression test, coefficient of determination test (R^2), t test (partial) and F test (simultaneous). Based on data analysis and discussion, it can be said that the distribution of ZIS funds (X_1) has a positive and insignificant effect on the human development index with a coefficient value of $4.929E-11$ and a significance of 0.146. The provincial minimum wage has a negative and significant effect on the human development index with a coefficient value of $-3.868E-6$ and a significance of 0.000. poverty has a negative and significant effect on the human development index with a coefficient of -0.345 and a significance of 0.000.

Keywords : ZIS, UMP, Poverty, Human Development Index

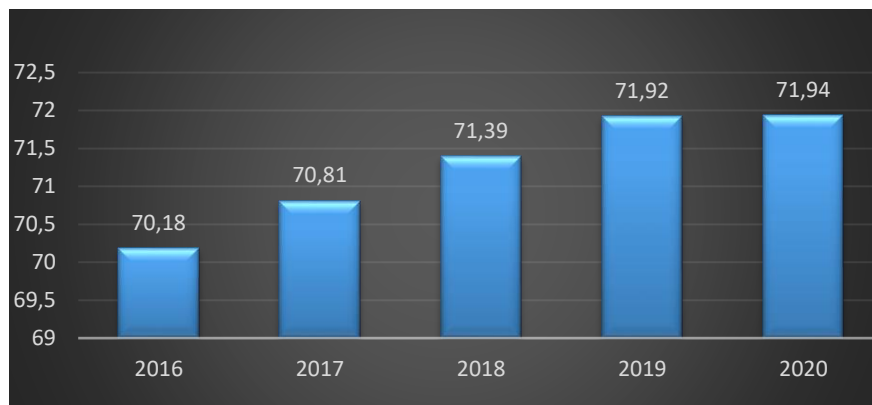
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh distribusi zakat, infaq, sedekah, upah minimum provinsi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jenis data sekunder yaitu data ZIS tahunan, upah minimum provinsi, indeks kemiskinan dan pembangunan manusia tahun 2016-2020 yang diperoleh dari BAZNAS dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data dilakukan dalam bentuk uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis meliputi uji regresi data panel, uji koefisien determinasi (R^2), uji t (parsial) dan uji F (simultan). Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat dikatakan bahwa penyaluran dana zis (X_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai koefisien $4,929E-11$ dan signifikansi 0,146. upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai koefisien $-3,868E-6$ dan signifikansi 0,000. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien -0,345 dan signifikansi 0,000.

Kata Kunci: ZIS, UMP, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia

A. Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur dengan beberapa parameter, dan yang paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia (Harjunadhi & Rahmawati, 2020). Indonesia pada tahun 2020 menempati peringkat 107 dunia pada IPM (UNDP, 2020), sedangkan dibanding dengan negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ke lima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Vietnam (Citradi, 2020). Berikut merupakan data nilai IPM Indonesia dari tahun 2016-2020:



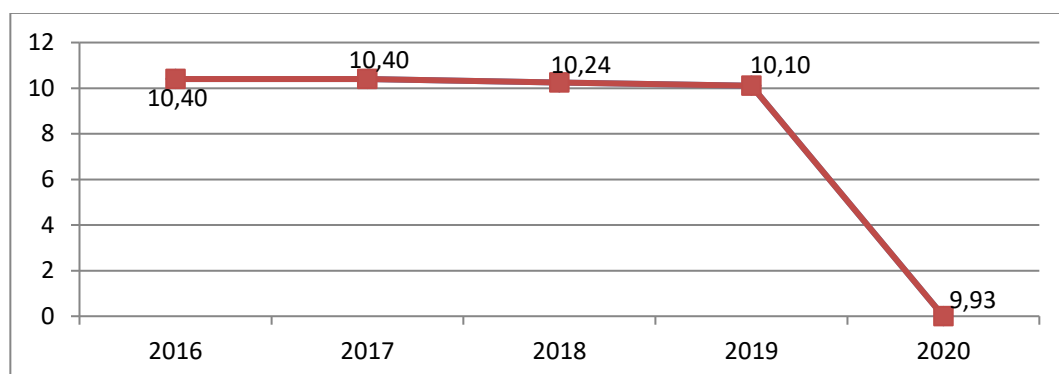
Gambar 1. IPM Indonesia Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1 memperlihatkan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 di Indonesia nilai IPM terus mengalami kenaikan. Meskipun IPM di Indonesia dari tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan akan tetapi ketimpangan yang terjadi pada pembangunan manusia ternyata masih tergolong tinggi. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya perbedaan nilai IPM antara beberapa daerah terutama wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang nilai IPM nya masih jauh dari standar nilai IPM nasional yaitu 71,94. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat yang nilai IPM nya rata-rata telah mencapai standar nilai IPM nasional. Provinsi yang ketimpangannya terlihat sangat jelas adalah provinsi DKI Jakarta dan Papua. Ketimpangan merupakan salah satu masalah lama yang belum bisa teratasi di Indonesia, dengan semakin meningkatnya nilai IPM di Indonesia

diharapkan semakin memperbaiki kualitas pembangunan manusia dan memperkecil ketimpangan yang ada. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPM. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap IPM antara lain penyaluran dana ZIS, Upah Minimum Provinsi dan kemiskinan.

Ketimpangan yang terjadi pada IPM didukung oleh indikator atau dimensi yang membentuknya yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan dalam IPM mencakup Umur Harapan Hidup (UHH). UHH adalah angka rata-rata umur dan seberapa baik kebiasaan hidup sehat pada suatu daerah. Tahun 2020 nilai UHH paling tinggi dengan angka 74,99 tahun adalah D.I Yogyakarta, sedangkan nilai UHH paling rendah dengan angka 65.06 tahun adalah Sulawesi Barat. Pada tahun 2016-2020 selisih UHH terlihat terus mengalami penurunan, hal tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan pada Umur Harapan Hidup (UHH) sudah semakin baik dan berkurang.

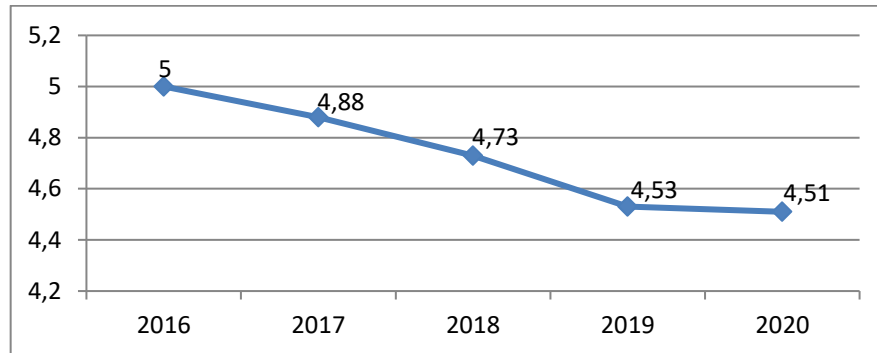


Gambar 2. Selisih Umur Harapan Hidup Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Selain kesehatan, aspek lain yang mengalami ketimpangan adalah pendidikan. Dua indikator yang membentuk dimensi pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan, sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan. Dari data yang ada, D.I Yogyakarta merupakan provinsi dengan nilai HLS tertinggi dan Papua merupakan provinsi dengan nilai HLS terendah. Dari data tersebut dapat diketahui adanya ketimpangan Harapan Lama Sekolah. Pada tahun 2020, usia sekolah 7 tahun ke atas di Provinsi Yogyakarta

diperkirakan mencapai 15,59 tahun. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua hanya 11,08 tahun. Selisih antara provinsi tertinggi dan terendah di HLS Indonesia semakin mengecil dari tahun ke tahun, yang berarti tingkat ketimpangan HLS juga semakin menurun.

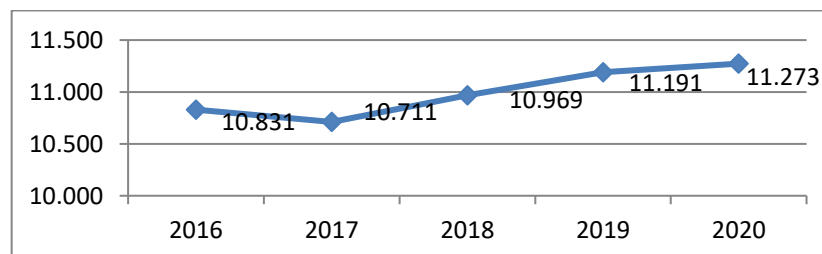


Gambar 3. Selisih Harapan Lama Sekolah Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Selain kesehatan dan pendidikan, standar hidup yang layak juga berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita tahunan yang disesuaikan. Dari tahun 2016 hingga 2020, ketimpangan dimensi standar hidup semakin melebar, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2020, DKI Jakarta menempati peringkat pertama dalam hal pengeluaran per kapita tahunan yang disesuaikan sebesar Rp 18.227.000. Sementara itu, Provinsi Papua berada di peringkat terendah yaitu Rp 6.954.000, kurang dari separuh Provinsi DKI Jakarta. Dari data tersebut dapat diketahui dimensi standar hidup layak perlu mendapat perhatian yang lebih untuk mengatasi semakin banyaknya angka selisih standar hidup layak antara provinsi tertinggi dan provinsi terendah.



Gambar 4. Selisih Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Ketimpangan merupakan salah satu masalah lama yang belum bisa teratasi di Indonesia, semakin meningkatnya nilai IPM di Indonesia diharapkan semakin memperbaiki kualitas pembangunan manusia dan memperkecil ketimpangan yang ada. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPM. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap IPM antara lain penyaluran dana ZIS, Upah Minimum Provinsi dan Kemiskinan.

Penelitian tentang ZIS terhadap IPM, dalam penelitian Mudita Sri Karuni (2019) menyatakan bahwa zakat berpengaruh terhadap IPM melalui masing-masing indikator IPM dengan nilai koefisien masing-masing yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 0,860, rata-rata lama sekolah sebesar 0,948 dan pendapatan sebesar 0,747. Penelitian tersebut juga dilakukan Suprayitno, Aslam, Harun, Pan, & Hotel (2017) pada program pembangunan manusia di Malaysia menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di lima negara bagian dalam jangka pendek dan panjang.

Penelitian tentang UMP terhadap IPM, dalam penelitian Sudhir Anand And Amartya Sen (2000) menyatakan bahwa komponen pendapatan berperan penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia terutama dalam dimensi pendidikan dan umur panjang. Penelitian tersebut juga dilakukan oleh Zainuddin (2015) menyatakan bahwa upah minimum daerah dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangga hingga mempengaruhi dimensi yang digunakan sebagai indikator IPM dengan pengaruh sebesar 0,033.

Penelitian tentang kemiskinan terhadap IPM, dalam penelitian Adelfina, I Made Jember (2016) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien -0.106. Penelitian juga dilakukan oleh Regina, Bahar Sinring dan Arifin (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai koefisien sebesar -0,731, statistik sebesar -8.114 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Penelitian ini mendukung Pendapat Fosu (2007) menjelaskan bahwa negara dengan tingkat kemiskinan yang relatif besar cenderung menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani *fenomena gap* yang ada dan

mengisi kesenjangan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembanding, penambah wawasan pengetahuan dan penelitian terdahulu untuk penelitian selanjutnya.

B. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (HDI) adalah indeks komposit yang diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Laporan Pembangunan Manusia PBB sejak 1990 yang dirancang untuk mengukur kesejahteraan manusia di berbagai negara. Indeks tersebut menggabungkan ukuran harapan hidup, angka melek huruf, dan pendapatan untuk memberikan ukuran kesejahteraan dan perkembangan yang lebih luas (Baihaqi & Puspitasari, 2020). UNDP (*United Nations Development Programme*) melalui HDR (*Human Development Report*), telah mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “*Human development is about empowering people to identify and pursue their own paths for a meaningful life, one anchored in expanding freedoms*” (UNDP, 2020, p. 06).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas baik yang berdampak pada kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun non fisik (pendidikan). Pembangunan manusia juga dapat dilihat dari perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan. Mengenai hal tersebut UNDP (1995) menetapkan konsep tentang pembangunan manusia (UNDP, 1995, p. 01):

- a. Produktivitas (*productivity*), merupakan ukuran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, semakin baik produktivitas seseorang maka akan semakin baik kehidupannya.
- b. Pemerataan (*equity*), masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama baik dalam ekonomi, social maupun politik politik agar dapat berpartisipasi dan memanfaatkan peluang yang ada.
- c. Kestinambungan (*Sustainability*), tidak hanya perlu memastikan bahwa generasi sekarang memiliki akses terhadap peluang, tetapi juga harus memperhatikan generasi mendatang agar bisa mendapat peluang yang sama. Semua jenis modal, baik modal fisik, modal manusia maupun modal lingkungan harus dilengkapi.

- d. Pemberdayaan (*Empowerment*), pembangunan juga harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya pemerintah. Masyarakat harus terlibat penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi capaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah dengan menggunakan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

- 1) Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

- 2) Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- 3) Dimensi Standart Hidup Layak

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Dimensi dasar IPM adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur capaian dimensi kesehatan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan untuk mengukur capaian dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi hidup layak diukur dengan indeks paritas daya beli (BPS, 2021).

- a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rentang hidup rata-rata seseorang. Harapan hidup dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung (*Indirect Estimation*). Dalam penghitungan angka harapan hidup terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu Anak lahir hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), dimana nilai maksimum dan minimum masing-masing komponen merupakan nilai yang disepakati oleh semua negara. Pada komponen usia harapan hidup, batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar

United Nations Development Program (Badan Pusat Statistik, 2014, p. 102).

b. Pengetahuan

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (*mean years schooling*). Dalam proses perhitungan, kedua indikator tersebut diberi bobot masing-masing dan kemudian digabungkan. Harapan lama sekolah merupakan harapan lamanya seseorang dapat merasakan dunia pendidikan formal dimasa mendatang. Usia yang digunakan untuk penghitungan harapan lama sekolah adalah 7 tahun ke atas. Kemudian untuk batas maksimum dan minimum harapan lama sekolah adalah 18 tahun dan 0 tahun untuk minimum. Sedangkan yang dimaksud dengan rata-rata lama sekolah adalah penggambaran dari banyaknya tahun yang digunakan oleh warga Negara dalam melaksanakan pendidikan formal. Untuk batas maksimumnya adalah 15 tahun dan minimumnya adalah 0 (Badan Pusat Statistik, 2014, p. 103).

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak merupakan standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup sebagai akibat meningkatnya kondisi ekonomi seseorang. Pengukuran standar hidup layak yang dilakukan UNDP adalah dengan menggunakan PNB per kapita yang disesuaikan, sedangkan untuk Badan Pusat Statistik (BPS) pengukurannya menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao (Badan Pusat Statistik, 2014, p. 104).

2. Dana Zakat, Infak, Sedekah

Zakat adalah dana yang dikeluarkan berdasar perintah Islam untuk membantu seseorang yang kurang beruntung dan seseorang yang tidak mampu membantu dirinya sendiri. Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh BAZNAS disalurkan kepada yang berhak menerima menurut hukum Islam.

Zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi setiap jiwa baik muslim maupun muslimin yang

dibayarkan ketika bulan ramadhan. Zakat maal merupakan zakat untuk mensucikan harta yang dibayarkan ketika sudah mencapai syarat dan *nishab* yang ditentukan (Baznas, 2019). Perintah untuk membayar dan menunaikan zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'(A-Baqarah:43)."

Sedangkan infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, Infaq adalah sumber daya yang diberikan oleh seseorang atau unsur usaha di luar zakat untuk keuntungan keseluruhan (Baznas, 2019).

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Yaitu orang-orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Al-Imran:134).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk ber infaq dimanapun dan kapanpun tanpa batasan waktu, selain infaq kesunahan lain seorang muslim yang hampir sama dengan nya yaitu sedekah. Sedekah adalah memberi kepada orang miskin yang membutuhkan untuk menegaskan pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan (Baznas, 2019). Pengertian sedekah untuk yang lebih luas lagi yaitu tidak harus berbentuk uang tetapi bisa dilakukan dengan cara tersenyum, menyingkirkan batu di jalan, membantu tenaga, dzikir, mengajak kebaikan, mencegah kejahatan, senyum tulus, dan kata-kata yang tulus dan baik, dan masih banyak lagi perbuatan yang merupakan bagian dari sedekah (Purwanti, 2020).

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْنِسُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

3. Upah Minimum Provinsi

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah merupakan kompensasi yang diberikan sebagai suatu bentuk penghargaan dari perusahaan kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang dilaksanakan. Upah tersebut

mempunyai fungsi sebagai jaminan untuk kemajuan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja, ditetapkan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Teneh et al., 2019).

Upah minimum dalam Islam mendapat perhatian yang cukup besar, mengingat upah merupakan salah satu hak yang diperoleh seorang Muslim yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi pengusaha, upah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diberikan kepada pekerjanya.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

“Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya”(Majah, 1993, p. 250).

Islam menganjurkan untuk memberikan upah sesegera mungkin baik diawal maupun diakhir pekerjaan sesuai dengan aturan yang disepakati. Hal tersebut dilakukan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan si pemberi kerja. Upah minimum merupakan suatu bentuk perlindungan untuk pekerja yang diatur dalam perundang-undangan, adanya ketidakseimbangan antara pemberi kerja dan keinginan pekerja membuat perlunya adanya perlindungan tersebut. Di Indonesia dalam menetapkan upah minimum harus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah, menggunakan penghitungan dengan rumus:

- a. Rumus batas atas:

$$\frac{\text{Rata - rata konsumsi per kapita}(t) \times \text{Rata - rata banyaknya ART}(t)}{\text{Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}(t)}$$
- b. Rumus batas bawah:

$$\text{Batas bawah UM}(t) = \text{Batas atas UM}(t) \times 50\%$$

Rumus Upah Minimum yang akan ditetapkan, sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{Max(PE_{(t)}, inflasi_{(t)}) \times \left[\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right] \times UM_{(t)}\}$$

4. Kemiskinan

Kemiskinan menurut definisi Badan Pusat Statistik mengacu pada ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan dengan

ukuran dan standart tertentu. Menurut Bank Dunia kemiskinan merupakan sekelompok orang yang tidak memiliki pilihan dan kesempatan dalam peningkatan taraf hidup guna mencapai kehidupan yang lebih baik dalam ekonomi maupun sosial (Yolanda, 2017). Definisi kemiskinan yang dijelaskan dalam UU. No. 24 Tahun 2004 adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kamilaus Konstanse Oki dkk, 2020, p. 46).

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt tidak pernah menyebutkan bahwa kemiskinan yang dialami umat manusia disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam (kemiskinan natural). Berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan segala fasilitas yang memadai untuk kebutuhan hidup manusia, dan membuat bumi ini mudah untuk dimanfaatkan oleh manusia (Lukman Hakim, n.d., p. 630).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ - ١٥

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, rejeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Al-Mulk:15).

Jadi jika dengan segala fasilitas dan sarana yang telah Allah berikan tersebut, manusia masih saja terbelenggu dalam masalah kemiskinan, maka faktor penyebab utamanya adalah dari manusia itu sendiri.

Secara konsepsional, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan itu ditetapkan dengan tolak ukur kemiskinan (Itang, 2015). Kemiskinan merupakan masalah nyata yang harus dihadapi oleh setiap daerah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi (Sharp, A.M., Register, C.A., dan Grimes, 2006):

a. Secara Mikro

Munculnya kemiskinan muncul karena adanya kepemilikan aset yang tidak konsisten yang menyebabkan dispersi pendapatan yang tidak merata. Orang miskin hanya memiliki aset terbatas dan kualitas buruk.

b. Kemiskinan Muncul Karena Kontras dalam Sifat SDM

Kualitas SDM yang buruk mengindikasikan produktivitas rendah, yang dengan demikian menurunkan kompensasi. Buruknya kualitas SDM karena pendidikan rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Bagi seseorang yang mempunyai cukup modal akan lebih besar peluang untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Namun bagi seseorang yang kurang dalam hal permodalan, hal tersebut juga akan mempengaruhi semakin kecilnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ketiga penyebab kemiskinan ini berdasar pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle Of Poverty*). Keterbelakangan pasar yang tidak sempurna dan kurangnya modal menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan pendapatan juga rendah. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi (Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, 2016).

C. Hipotesis

1. Pengaruh Dana ZIS Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian Mudita Sri Karuni dengan koefisien masing-masing 0,860, 0,948, 0,747 dan signifikansi masing-masing 0,000 dan 0,05 menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap seluruh indikator indeks pembangunan manusia. Eko Suprayitno, Mohamed Aslam, Azhar Harun (2017) menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di lima negara bagian dalam jangka pendek dan panjang. Cut Risya Verlita (2017) dengan nilai koefisien sebesar 1,136 dan signifikansi 0,0008 yang menyatakan bahwa zakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan analisis konseptual dan hasil penelitian di atas dapatlah disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 = Zakat, infaq, sedekah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) dengan koefisien regresi 0,005 dan signifikansi 0,01 menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena dengan meningkatnya upah minimum akan berpengaruh pula pada aspek daya beli masyarakat yang merupakan indikator dari indeks pembangunan manusia. Herman (2018) dengan nilai koefisien sebesar 1,432 dan signifikansi 0,003 menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia di Pekanbaru. Rizqi Imelda, Mohammad Balafif, Susi Tri Wahyuni dengan nilai koefisien 1,97 dan signifikansi 0,0376 menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Sidoarjo. Berdasarkan analisis konseptual dan hasil penelitian di atas dapatlah disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 = Tingkat Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian Denny Sulistiyo Mirza (2009) dengan nilai koefisien -0.208 dan signifikansi 5% menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nursiah Cholid dan Yusbar Yusuf (2014) dengan nilai koefisien -0,163 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian Novita Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai koefisien -0,079 dan sign. 0,016. Berdasarkan analisis konseptual dan hasil penelitian di atas dapatlah disusun hipotesis sebagai berikut:

H3 = Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

D. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey. Metode survey adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta dari fenomena yang ada dan mencari informasi faktual tentang sistem sosial, ekonomi, atau politik suatu kelompok atau suatu daerah. Jenis data

yang digunakan adalah data panel, data panel yang digunakan yaitu data *cross section* berupa data 12 provinsi di Indonesia dan *time series* berupa data Penyaluran ZIS, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan dan IPM selama 5 Tahun dari tahun 2016-2020. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia dengan sampel sebanyak 12 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Metode dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel penelitian ini mempertimbangkan provinsi dengan data lengkap mengenai Penyaluran Dana ZIS, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016-2020. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel.

E. Hasil Penelitian

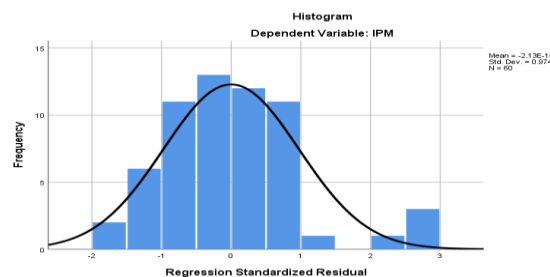
1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal dalam model regresi. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu:

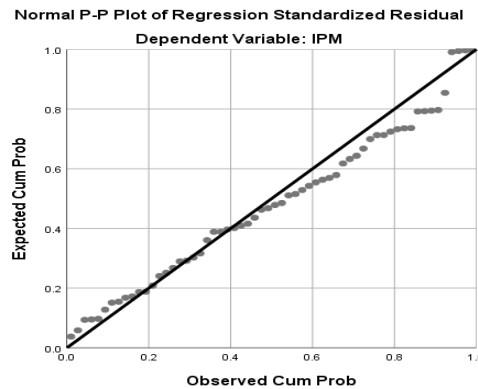
1) Analisis Grafik

Analisis grafik merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui kenormalan residual dalam metode regresi. Dalam analisis grafik terdapat dua analisis yaitu analisis grafik histogram dan grafik normal plot. Salah satu analisis grafik paling mudah untuk digunakan yaitu dengan cara melihat grafik histogram.



Gambar 5. Hasil Uji Grafik Histogram
Sumber: hasil olah data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat diketahui bahwa grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal dan data menyebar mengikuti garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat uji normalitas, karena jika distribusi data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Gambar 6. Uji Normalitas dengan P-P Plot
 Sumber: hasil olah data SPSS 25 (2022)

Pada gambar normal probability plot diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis normal dan penyebarannya mendekati dari garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik memerlukan ketelitian yang sangat besar, secara visual analisis grafik terlihat normal akan tetapi secara statistik bisa sebaliknya, oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual (ghozali, 2018).

Tabel 1. Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.21311890
Most Extreme Differences	Absolute		.114
	Positive		.114
	Negative		-.059
Test Statistic			.114
Asymp. Sig. (2-tailed)			.051 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.390 ^d
	99% Confidence	Lower Bound	.377

	Interval	Upper Bound	.402
Sumber : hasil olah data SPSS 25 (2022)			
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

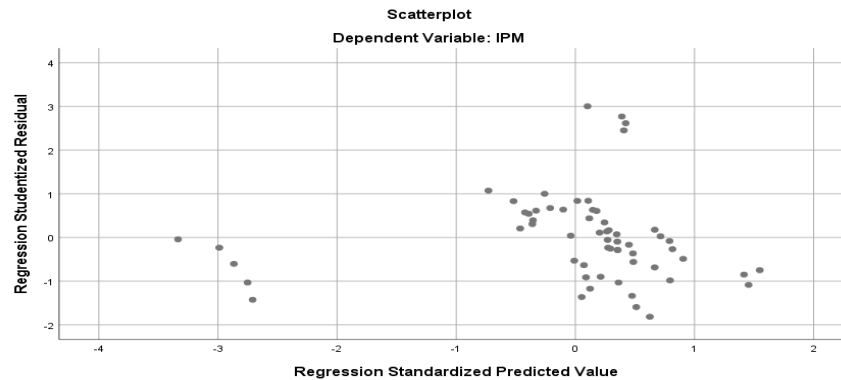
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0.051 > 0.05$ yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

1) Model *Scatterplot*

Model Scatterplot merupakan uji dalam bentuk grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara 2 variabel.

Tabel 2. Uji Heroskedastisitas dengan Scatterplot



Sumber: hasil olah data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut menunjukkan tidak terjadi heroskedastisitas pada model regresi.

2) Model *Rank Spearman*

Rank Spearman merupakan sebuah uji model dimana dilakukan perhitungan dari korelasi *rank spearman* antara variabel absolut u_t dengan variabel-variabel bebas. Dalam uji ini apabila nilai *rank spearman* antara variabel *absolut residual regresi* dengan variabel bebas $> 0,05$ maka dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji Heroskedastisitas dengan Rank Spearman

Correlations						
			X1 (Penyaluran ZIS)	X2 (UMP)	X3 (Kemiskinan)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.300*	.170	.010
		Sig. (2-tailed)	.	.020	.193	.938
		N	60	60	60	60
	X2	Correlation Coefficient	.300*	1.000	-.114	.198
		Sig. (2-tailed)	.020	.	.384	.128
		N	60	60	60	60
	X3	Correlation Coefficient	.170	-.114	1.000	.088
		Sig. (2-tailed)	.193	.384	.	.505
		N	60	60	60	60
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.010	.198	.088	1.000
		Sig. (2-tailed)	.938	.128	.505	.
		N	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 Sumber : hasil olah data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai Sig (2-tailed) X1 (Penyaluran Zakat) adalah 0,938, nilai Sig (2-tailed) X2 (UMP) adalah 0,128 dan nilai Sig (2-tailed) X3 (Kemiskinan) adalah 0,505. Semua nilai Sig (2-tailed) yang ada lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

c. Uji Autokorelasi

1) Uji Durbin Watson (Uji D-W)

Hasil dari Uji Autokorelasi ini ditampilkan dalam bentuk tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
.736 ^a	.541	.480	3.08578	.541	8.769	7	52	.000	2.247

Sumber: hasil olah data SPSS 25 (2022)

a. Predictors: (Constant), x3, Dum20, x1, Dum18, Dum17, x2, Dum19

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 4 diketahui durbin Watson sebesar 2.247, sedangkan diketahui k= 3, dl= 1.4797, du=1.6889. Berdasarkan hal tersebut dapat

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.736 _a	.541	.480	3.08578	.541	8.769	7	52	.000	2.247
Sumber: hasil olah data SPSS 25 (2022) a. Predictors: (Constant), x3, Dum20, x1, Dum18, Dum17, x2, Dum19 b. Dependent Variable: y										

3. Uji Simultan (F)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (F)

$$F \text{ tabel} = (k ; n-k) = (3 ; 60-3) = (3; 57) = 2,766$$

4. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79.605	2.017		39.467	.000
	x1 (Penyaluran ZIS)	4.929E-11	.000	.146	1.476	.146
	x2 (UMP)	-3.868E-6	.000	-.457	-4.229	.000
	x3 (Kemiskinan)	-.345	.066	-.514	-5.256	.000
a. Dependent Variable: y						

Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui pengaruh pada masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent:

a. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Hasil koefisien penyaluran dana ZIS terhadap IPM diperoleh nilai $T_{hitung} = 1.476$ yang artinya $T_{hitung} < T_{tabel} 2,002$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,146 > 0,05$. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh positif terhadap IPM ditolak.

b. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Hasil koefisien Upah Minimum Provinsi terhadap IPM diperoleh nilai $T_{hitung} = -4.229$ yang artinya $T_{hitung} > T_{tabel} 2,002$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$. Kondisi ini dapat disimpulkan Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap IPM ditolak.

c. Pengujian Hipotesis 3 (H3)

Hasil koefisien Kemiskinan terhadap IPM diperoleh nilai $T_{hitung} = -5.256$ yang artinya $T_{hitung} > T_{tabel} 2,002$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$. Kondisi ini dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM diterima.

5. Estimasi Nilai Koefisien Regresi

Analisis regresi berganda atas nilai koefisien dimanfaatkan untuk melihat besaran pengaruh masing-masing variabel Penyaluran Dana ZIS, Upah Minimum Provinsi, dan Kemiskinan terhadap IPM. Hasil analisis dimaksud tersaji di tabel 9 berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Data Panel

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79.605	2.017		39.467	.000

	x1 (Penyaluran ZIS)	4.929E-11	.000	.146	1.476	.146
	x2 (UMP)	-3.868E-6	.000	-.457	-4.229	.000
	x3 (Kemiskinan)	-.345	.066	-.514	-5.256	.000
a. Dependent Variable: y						

Tabel di atas menjadi sumber penyusunan persamaan regresi penelitian sebagai berikut: $Y_{it} = 79.605 + 4.929 (X1) - 3.868 (X2) - 0.345 (X3) + e_{it}$

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan:

- Nilai konstanta sebesar 79.605 mengindikasikan jika tidak ada variabel bebas Penyaluran Dana ZIS, Upah Minimum Provinsi, dan Kemiskinan atau semua variabel bebas dimaksud bernilai nol (0) maka kondisi IPM di Indonesia adalah rata-rata sebesar 79.605. Angka tersebut menunjukkan potensi dasar IPM di Indonesia adalah sudah termasuk dalam kategori tinggi.
- Nilai koefisien regresi variabel Penyaluran Dana ZIS adalah 4.929E-11 yang berarti bahwa ketika terjadi kenaikan rata-rata 1 (satu) juta rupiah pada variabel penyaluran dana ZIS maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 4.929E-11 %, tetapi temuannya tidak signifikan (tidak cukup dapat dipercaya).
- Nilai koefisien regresi variabel Upah Minimum Provinsi adalah -3.868E-6 yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 persen (%) pada variabel Upah Minimum Provinsi maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar -3.868E-6 %. Temuan ini signifikan pada taraf di bawah 1 persen (0,000).
- Nilai koefisien regresi variabel Kemiskinan adalah -0.345 yang berarti bahwa ketika terjadi kenaikan 1 persen (%) pada variabel kemiskinan maka indeks pembangunan manusia akan turun rata-rata sebesar 0.345%. Temuan ini terkategori signifikan di bawah 1 persen (0,000).

F. Pembahasan Penelitian

1. Penyaluran Dana ZIS dan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa Penyaluran Dana ZIS berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien 4.929E-11 dan sig. > 0.05 yaitu 0.146. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan 1 Juta Rupiah pada variabel penyaluran dana ZIS maka akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia sebesar 4.929E-11 %. Namun demikian pengaruh penyaluran dana ZIS tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

12 provinsi Indonesia pada tahun 2016-2020 karena nilai probabilitas sebesar 0.146 lebih besar dari 0.05.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan penyaluran dana ZIS tidak selalu diiringi oleh naiknya Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi ini muncul karena kecenderungan pemberian atau Penyaluran Dana ZIS kepada masyarakat hanya bersifat sporadis, tidak dilakukan secara berkala atau terus-menerus. Model sporadis tidak mampu menjadi pendorong kekuatan daya beli masyarakat atau menaikkan tingkat konsumsi masyarakat itu sendiri. Model sporadis ini umunya terdapat pada Penyaluran Dana ZIS konsumtif, sedangkan untuk Penyaluran Dana ZIS produktif bisa disebabkan adanya keterbatasan kemampuan fisik karena faktor usia dalam menjalankan usaha yang diberdayakan ataupun sulitnya mengembangkan dan mempertahankan usaha yang diberdayakan (Tika Widiastuti, i 2015), selain itu jika dilihat dari potensi zakat di Indonesia, penghimpunan zakat masih sangat jauh dari potensi yang ada. Tahun 2020 potensi zakat Indonesia adalah 327,6 triliun, sedangkan untuk penghimpunan zakat tahun 2020 hanya sebesar 12,273 triliun (BAZNAS, 2021, p. 02). Hal tersebut menunjukkan hanya 26% penghimpunan zakat dari potensi zakat di Indonesia sehingga dimungkinkan zakat tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian mustahik Indonesia.

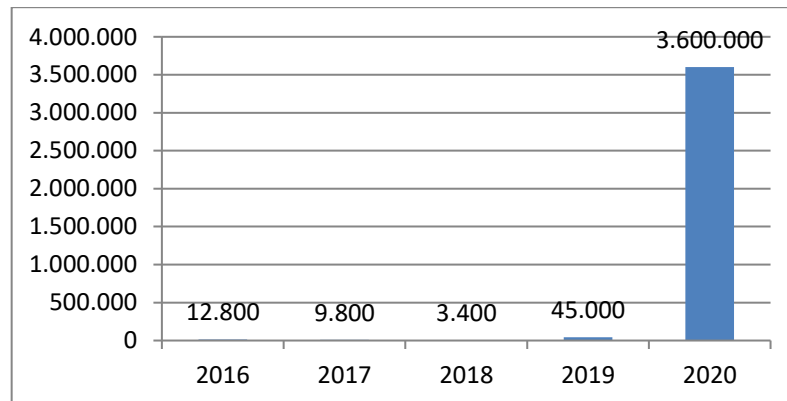
Jika dianalisis secara statisitik kemungkinannya disebabkan oleh sampel dalam penelitian ini yang hanya meneliti 12 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa disebabkan oleh sedikitnya sampel waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2016-2020.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Finantyo Eddy Wibowo dan Aang Gunaepi (2021), yang menyatakan bahwa Zakat, Infak, Sedekah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 9,501984 dan sign. sebesar 0.1713. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Mohammad soleh Nurzaman (2010) yang menyatakan bahwa variabel zakat tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai masing-masing sebesar -1.46 dan -0.38 .

2. Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien $-3.868E-6$ dan $\text{sig.} < 0.05$ yaitu 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan 1 % pada variabel Upah Minimum Provinsi maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar $3.868E-6$ %, jika terjadi kenaikan sebesar 1 % pada variabel Upah Minimum Provinsi maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar $3.868E-6$ %.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan upah minimum tidak selalu diiringi oleh naiknya Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dimungkinkan karena adanya fenomena yang memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi upah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pada perusahaan besar yang sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih, penggunaan teknologi dianggap lebih efektif daripada memberikan kenaikan upah pada tenaga kerja. Saat upah mengalami peningkatan, perusahaan cenderung akan mengurangi tenaga kerja dan lebih memilih menggunakan teknologi yang canggih (Nadia Islami: 945).



Gambar 7. Data PHK di Indonesia Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2020

Berdasarkan gambar 7 diketahui dari tahun 2016-2018 angka PHK di Indonesia terus mengalami penurunan. Tahun 2019 angka PHK di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 3.400 PHK tahun 2018 menjadi 45.000 PHK tahun 2019. Kenaikan PHK pada tahun 2019 salah satu faktor penyebabnya adalah banyak perusahaan lebih memilih menggunakan teknologi

tinggi dibanding harus memberikan kenaikan upah kepada tenaga kerja, hal tersebut juga merupakan sebagai dampak dari peralihan pemanfaatan teknologi di era revolusi industri 4.0 (Endah Lismartini, 2019), sedangkan pada tahun 2020 kenaikan angka PHK yang sangat tinggi disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda dunia, yang tentunya juga berdampak terhadap Indonesia.

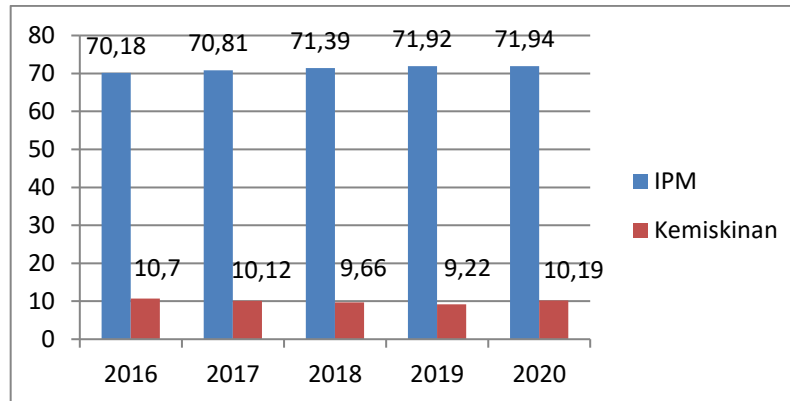
Kenaikan UMP juga cenderung mendorong kenaikan laju inflasi yang tidak sepadan. Kondisi ini akan terus menerus memposisikan masyarakat miskin menjadi tidak pernah mampu memiliki daya beli pada posisi *equilibrium* dengan kebutuhan dasarnya. Secara makro kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Permasalahan tersebut adalah semakin menyempitnya kesempatan kerja akibat meningkatnya upah minimum provinsi sebagai salah satu komponen dari biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya dapat berdampak pada penurunan indek pembangunan manusia melalui menurunnya pembangunan ekonomi dan munculnya kemiskinan sebagai akibat sempitnya kesempatan kerja (Safrida, Sofyan, 2014: 46).

Hal ini sejalan dengan penelitian Citra Islamiatus Izzah, Ignatia Martha Hendart (2021) yang menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan nilai koefisien sebesar -1,3E-007.

3. Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien -0,345 dan sig. < 0.05 yaitu 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan 1 persen (%) pada variabel Kemiskinan maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,345%.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ketika terjadi penurunan pada kemiskinan salah satunya disebabkan karena pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Kualitas manusia yang baik akan meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja masyarakat, sehingga memungkinkan mereka memiliki taraf hidup yang lebih baik (Meriyanti, 2015).



Gambar 8. Perbandingan IPM dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 8 menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2019 ketika Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan, maka angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2020 ketika angka kemiskinan di Indonesia naik, nilai Indeks Pembangunan Manusia tetap mengalami kenaikan akan tetapi dengan kenaikan yang sangat kecil yaitu 0,02, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu penyebab adanya tingkat kesehatan yang rendah sehingga dapat menurunkan produktivitas pekerja atau seseorang sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal yang menyebabkan penurunan pendapatan dan pemecatan karyawan, kemudian akan berakibat pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pendapatan, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika kemiskinan naik maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun yang disebabkan oleh rendahnya standar hidup layak masyarakat (Rizaldi Zakaria 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Denni Sulistio Mirza (2012) dengan nilai koefisien sebesar - 0,208192 dan sign. sebesar 0,000 menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu juga didukung oleh penelitian Finantyo Eddy Wibowo dan Aang Gunaepi (2021), yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -11.45890 dan Sign. 0,000.

G. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda data panel mengenai Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2016-2020 yaitu:

1. Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Terhadap IPM

Hasil koefisien Penyaluran Dana ZIS terhadap IPM diperoleh nilai $T_{hitung} = 1.476$ yang artinya T_{hitung} lebih kecil dibandingkan $T_{tabel} 2,002$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,146 > 0,05$. Kondisi ini dapat disimpulkan, bahwa Penyaluran Dana ZIS berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Kondisi ini diduga muncul karena kecenderungan pemberian/penyaluran dana ZIS kepada masyarakat miskin hanya bersifat sporadis, tidak dilakukan secara berkala/kontinu. Model sporadis tidak mampu menjadi pendorong kekuatan daya beli masyarakat dan/atau menaikkan tingkat konsumsi masyarakat itu sendiri.

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap IPM

Hasil koefisien Upah Minimum Provinsi terhadap IPM diperoleh nilai $T_{hitung} = -4.229$ yang artinya T_{hitung} lebih besar dibandingkan $T_{tabel} 2,002$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$. Kondisi ini dapat disimpulkan Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dengan kata lain saat UMP naik 1 (satu) persen, maka IPM cenderung turun sebesar 4,23%. Kondisi ini diduga karena adanya fenomena yang memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kenaikan UMP juga cenderung mendorong kenaikan laju inflasi yang tidak sepadan.

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap IPM

Hasil koefisien Kemiskinan terhadap IPM diperoleh nilai $T_{hitung} = -5.256$ yang artinya T_{hitung} lebih besar dibandingkan $T_{tabel} 2,002$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Kondisi ini menunjukkan saat kemiskinan naik 1 (satu) persen, maka IPM cenderung naik rata-rata sebesar 5,26 %. Hal tersebut muncul diduga karena pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pembangunan sumber

daya manusia. Kualitas manusia yang baik akan meningkatkan kreativitas dan efisiensi kerja masyarakat, sehingga memungkinkan mereka memiliki taraf hidup yang lebih baik yang selanjutnya dapat berdampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, Ahmad Briezy, and Puspitasari Puspitasari. 2020. Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*. 3. No. 2: 177. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272>.
- Baznas. 2019. *Outlook Zakat 2019*. Jakarta: Baznas.
- BPS. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Citradi, Tirta. 2020. *Indeks Pembangunan RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2>.
- Endah Lismartini & Arrijal Rachman. 2019. *Sepanjang 2019, 45 Ribu Pekerja di PHK*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1253865-sepanjang-2019-45-ribu-pekerja-di-phk>.
- Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, Warsilan. 2016. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinandi Kabupaten Kutai Kartanegara*. INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. Volume 12. No. ISSN print: 0216-7786, ISSN online: 2528-1097. <http://journal.feb.unmul.ac.id>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate (IBM SPSS 25)*. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Harjunadhi, Janitra Trieska, and Farida Rahmawati. 2020. *Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP Terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014 – 2018*. 16. No. 2: 241–49.
- Human Development Report 1995. New York: United Nations Development Programme. 1995. <https://doi.org/0-19-510023-9>.
- Itang. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Vol. 16.
- Kamilaus Konstanse Oki dkk. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Desa Takarai Kabupaten Malaka. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 5. No. 2503–3093.
- Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra. Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. No. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazis Ibnu. 1993. *Sunan Ib*.
- Meriyanti, Ni Komang. 2015. *Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bululeng pada Tahun 2011-2014*. Vol: 5. No: 10.
- Nadia Islami, Ali Anis. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 1*.
- Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta: Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS.
- Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat

- Nasional.
- Outlook Zakat Nasional 2020. Jakarta: Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional.
- Outlook Zakat Indonesia 2021. Jakarta: Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS).
- Purwanti, Dewi. 2020. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6. No. 1: 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.
- Rizaldi Zakaria. 2017. *Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*. Universitas Islam Indonesia.
- Safrida, Sofyan, Nura Syahrani. 2014. *Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi dan Pasar Kerja di Provinsi Aceh*. *Agrisep*. Vol (15) N.
- Sharp, A.M., Register, C.A., dan Grimes, P.W. 2006. *Economic of Social Issues*. New York: McGraw Hill.
- Sugiyono. 2015. *Statika Untuk Penelitian*. Bandung: PT Alfabeta.
- Teneh, Endrico Geraldo, dkk. 2019. Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 19. No. 04: 72–83.
- The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. *Human Development Report 2020*. New York: United Nations Development Programme, 2020. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>.
- Tika Widiastuti, S. R. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS*. Vol. 1, No. 1.
- Yolanda, Y. 2017. Analysis of Factors Affecting Inflation and Its Impact on Human Development Index and Poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*. 20. No. 4: 38–56. <https://doi.org/10.35808/ersj/873>.